

DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DETERMINANTS OF POVERTY IN THE RIAU ISLANDS PROVINCE

Ervin Nora Susanti¹, Sartiyah²

¹(Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan)

²(Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala)

¹ervin.nora@fekon.unrika.ac.id, ²sartysabang @unsyiah.ac.id

Abstrak

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan global yang dihadapi oleh berbagai wilayah di dunia yang harus mendapat perhatian oleh para pengambil kebijakan. Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau meningkat sebesar 5,9 persen pada tahun 2019, di mana jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 hingga Maret 2019 mencapai 128.462 orang, meningkat sebanyak 3.100 orang dibanding September 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan determinan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial terhadap kemiskinan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisis dengan Metode Ordinary Least Square. Hasil penelitian, secara simultan PDRB, pengangguran, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial berpengaruh terhadap kemiskinan. Secara parsial menunjukkan PDRB dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berpengaruh menurunkan kemiskinan, sedangkan pengangguran berpengaruh meningkatkan kemiskinan. Selanjutnya pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial tidak berpengaruh menurunkan kemiskinan. Dari hasil penelitian, diharapkan upaya penurunan pengangguran dan pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial agar dilakukan tepat sasaran pada kantong-kantong kemiskinan.

Kata Kunci: Kemiskinan; PDRB; Pengangguran; Pengeluaran Pemerintah

Abstract

Poverty is a structural and global problem faced by various regions in the world that is sure to get the attention of policy makers. The poverty in Riau Islands Province increased by 5.9 percent in 2019, where the number of poor people in March 2018 to March 2019 reached 128,462 people, an increase of 3,100 people compare to September 2018. This study aims to describe the determinants of poverty in the Riau Islands Province. Analysis to determine the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP), unemployment, government spending on education, health and infrastructure, and government spending on social protection against poverty. The data used are secondary data and analysis with the Ordinary Least Square Method. The results shows, simultaneously GRDP, unemployment, government spending on education, health and infrastructure as well as government spending on social protection against poverty. Partially shows, the GRDP and government spending in education, health and infrastructure has an effect on reducing poverty, while unemployment had an effect on increasing poverty. Furthermore, government spending on social protection has no effect on reducing poverty. From the results of the study, it is expected that efforts to reduce unemployment and government spending for social protection should be carried out right on the pockets of poverty.

Keywords: Poverty; GRDP; Unemployment; Government Expenditures

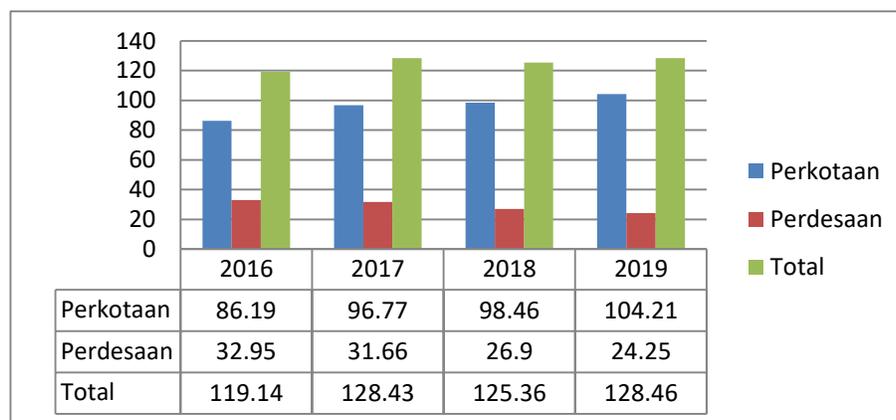
PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi problem multidimensional di dalam perekonomian pada banyak negara di dunia. Kemiskinan merupakan kondisi di mana masyarakat tidak saja memiliki tingkat pendapatan rendah, melainkan juga memiliki keterbatasan akses baik itu terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan maupun terhadap kegiatan ekonomi yang produktif. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari uraian di atas maka penduduk miskin adalah kelompok penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Terdapat empat dimensi pokok kemiskinan baik secara lokal maupun nasional, yaitu kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*), rendahnya kemampuan (*low of capabilities*), kurangnya jaminan (*low level of security*) dan ketidakberdayaan (*low of capacity or empowerment*), (Makmun, 2003). Kesempatan yang terbatas dihadapi penduduk miskin dalam aktivitas ekonomi menunjukkan kondisi ketidakmampuan untuk menandingi masyarakat pada kelas yang lebih tinggi, sebagai akibat kemampuan dalam kualitas yang dimilikinya sangat terbatas atau rendah. Ketidakmampuan tersebut dapat dilihat dari pendapatan, kualitasnya sebagai modal manusia dan minimnya dukungan dari pihak-pihak tertentu, baik modal, pendidikan, ketrampilan, kesehatan maupun empati yang dimiliki.

Kemiskinan juga menjadi permasalahan dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah total penduduk miskin di Kepulauan Riau per September tahun 2016 sampai dengan 2018 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin sampai dengan Maret 2019 mencapai 128.462 orang, naik sebanyak 3.100 orang dibanding September 2018. Peningkatan kemiskinan relatif lebih tinggi terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan. Lebih tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan bisa disebabkan karena beratnya beban hidup

masyarakat perkotaan dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perdesaan. Urbanisasi dapat menyebabkan tingginya tingkat persaingan untuk mendapatkan akses terhadap lapangan kerja, lahan, pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Persaingan dalam mendapatkan akses terhadap lapangan kerja pada gilirannya akan berdampak pada tingkat pengangguran. Masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan, pengetahuan, keterampilan yang berkualitas akan lebih memiliki peluang untuk mendapatkan akses pekerjaan. Sebaliknya masyarakat yang tidak mampu bersaing akan meningkatkan pengangguran. Peningkatan pengangguran akan berdampak pada penurunan tingkat pendapatan yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan penduduk miskin perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tersaji pada Gambar 1.



Sumber: BPS Kepulauan Riau (2019)

Gambar 1. Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2019 (Ribuan Jiwa)

Gambar 1 menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuasi naik dan turun sejak tahun 2016 hingga 2019, dengan kecenderungan mengalami peningkatan terutama di wilayah perkotaan. Pengangguran di perkotaan mendominasi masalah ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau, karena perkembangan ekonomi di daerah ini tergantung kepada sektor industri,

perdagangan dan jasa yang berada di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau akibat pengangguran di perkotaan yang terus meningkat, sedangkan di perdesaan mengalami penurunan. Peningkatan pengangguran tersebut dapat berdampak kepada perkembangan PDRB yang dihasilkan di daerah.

Perkembangan PDRB di Provinsi Kepulauan Riau tidak cukup menggembirakan, karena sejak tahun 2016 hingga 2018 cukup rendah yaitu antara 2 persen pada tahun 2017 hingga 4.97 persen tahun 2016, sedangkan tahun 2018 sebesar 4.56 persen. Fluktuasi tersebut dapat menjadi pertanyaan dan kekuatiran terhadap perkembangan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan karena tujuan pembangunan pada dasarnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. Pemerataan pembangunan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada tingkat daerah, pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan PDRB pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memungkinkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satu bentuk kebijakan untuk menunjang pencapaian kesejahteraan masyarakat daerah adalah melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Khususnya adalah alokasi pengeluaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial.

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan modal manusia dan sarana prasarana terus meningkat hingga 65.40 persen tahun 2016 dan sebesar 59.91 persen tahun 2017. Namun di bidang perlindungan sosial pengeluaran pemerintah tahun 2016 menurun sebesar 27.60 persen dan tahun 2017 meningkat lagi menjadi 74.55 persen, sedangkan tahun 2018 tidak mengalami peningkatan (Kemenkeu, 2019). Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial dimaksudkan sebagai bantuan langsung untuk

memberdayakan penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam jangka pendek, sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam jangka panjang.

Berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah tersebut akan bergantung pada ketersediaan dan mekanisme penggunaan anggaran yang dimiliki oleh daerah (Jasmina *et al*, 2001). Rusdarti (2013) menyatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh kebijakan anggaran yang menunjukkan keberpihakan pada masyarakat miskin (*pro-poor budget*). Dari uraian di atas perlu dianalisis pengaruh PDRB, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap upaya pengentasan kemiskinan tersebut.

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis determinan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu pengaruh faktor PDRB, pengangguran, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial terhadap kemiskinan, baik pengaruh secara parsial maupun secara simultan.

METODOLOGI

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau publikasi dari berbagai lembaga atau institusi yang terkait. Data dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan. Data kemiskinan, PDRB dan pengangguran diperoleh dari BPS sedangkan data pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta pengeluaran untuk perlindungan sosial diperoleh dari DJPK KEMENKEU Pusat Jakarta. Data dalam penelitian ini adalah data *cross section* dari tujuh Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau dengan runtut waktu selama

periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018. Sehingga secara keseluruhan data berjumlah 49 pengamatan.

Metode Analisis Data

Untuk mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu PDRB, pengangguran, pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, serta pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial dilakukan dengan menggunakan analisis *Ordinary Least Square* (OLS).

Berdasarkan observasi data dan terhadap persamaan regresi yang ada maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 PDRB + \alpha_2 PENGANGGURAN + \alpha_3 BELANJA_1 + \alpha_4 BELANJA_2 + \varepsilon$$

dimana :

Y : Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)

$PDRB$: Nilai PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010 (Milyar Rupiah)

$PENGANGGURAN$: Jumlah Pengangguran (orang)

$BELANJA_1$: realisasi belanja APBD yang di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (Milyar Rupiah)

$BELANJA_2$: besarnya realisasi belanja APBD untuk perlindungan sosial (Milyar Rupiah)

Nilai koefisien estimasi yang diharapkan adalah $\alpha_0, \alpha_2 > 0$ dan $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 < 0$.

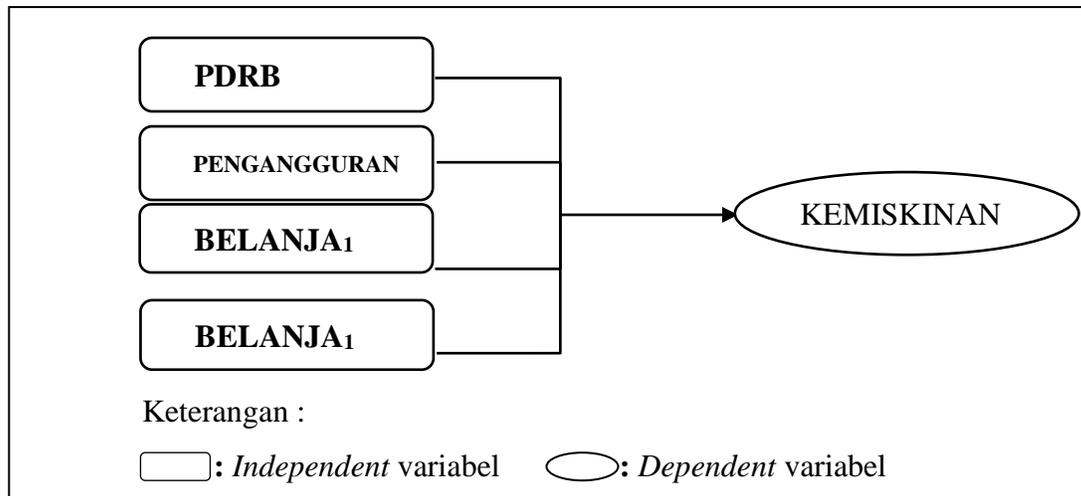
Kerangka Pemikiran

PDRB, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yang erat dengan kemiskinan. PDRB yang besar menunjukkan prestasi aktivitas produksi yang besar, pengangguran yang besar akan memberi sinyal akan rendahnya penyerapan tenaga kerja dan pendapatan dalam masyarakat. Kenyataan pengangguran menyebabkan pendapatan masyarakat rendah, sehingga kesejahteraan menjadi menurun. Hal ini menyebabkan masuknya masyarakat ke dalam keterbatasan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan.

Gunawan Sumodiningrat (2002), menjelaskan bahwa masyarakat miskin secara umum ditandai oleh berbagai hal yaitu 1). Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, gizi (*basic need deprivation*); 2). *Unproductiveness*; 3). *inaccessibility*; 4). Menentukan masa depan diri sendiri serta sering diperlakukan diskriminatif, memiliki rasa ketakutan dan kecurigaan, dan memiliki sikap apatis dan fatalistik; dan 5). Sulit membebaskan diri dari mental budaya miskin serta merasa martabat dan harga dirinya rendah.

Pengangguran merupakan masalah dalam perekonomian yang mempengaruhi manusia secara langsung dan mengganggu kesejahteraan. Umumnya seseorang kehilangan pekerjaan akan mengalami penurunan standar kehidupan dan psikologis, (Mankiw, 2006). Pengangguran merupakan kondisi tidak produktifnya seseorang yang pada gilirannya akan membuat seseorang tidak memiliki pendapatan sehingga mereka tidak berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan masuk menjadi miskin. Menurut Sukirno (2008) pengangguran adalah seseorang yang digolongkan angkatan kerja dengan umur 15 tahun ke atas, yang aktif mencari pekerjaan pada upah tertentu, namun belum memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Yacoub (2012), Yanthi dan Marhaeni (2015) dan Putra (2018) dalam studi menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Selain PDRB dan pengangguran, pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan. Misdawita (2013), Sartiyah *et. al* (2017), dan Fithri (2017) dalam studi menemukan adanya pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan efektif menurunkan tingkat kemiskinan. Misdawita (2013) namun tidak dengan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan subsidi akibat tidak tepat sasarannya pengguna subsidi di lapangan. Hubungan antara PDRB, pengangguran dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran

PEMBAHASAN

Kemiskinan dan Pengangguran Di Provinsi Kepulauan Riau

Hasil penelitian terhadap angka kemiskinan menunjukkan perkembangan yang kurang memuaskan, karena terjadi fluktuasi dan menunjukkan peningkatan, yang terjadi di daerah perkotaan, sedangkan daerah perdesaan mengalami trend yang menurun. Akibat perbedaan ini menunjukkan perkembangan total kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuasi dan tidak stabil. Kondisi kemiskinan ini dipengaruhi oleh peningkatan kemiskinan di daerah perkotaan, sedangkan di daerah perdesaan malah mengalami penurunan. Lebih rinci perkembangan penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Perubahan kemiskinan seperti digambarkan di atas dapat terjadi oleh beberapa faktor ekonomi seperti PDRB dan pengangguran. PDRB dan pengangguran merupakan prestasi ekonomi yang langsung berkaitan dengan kemiskinan. PDRB menunjukkan kemampuan produksi masyarakat suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa, sedangkan pengangguran adalah masyarakat yang tidak berkontribusi dalam menghasilkan produksi.

Tabel.1. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2019

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perubahan
2016	8619	3295	11914	-
2017	9677	3166	12843	7798
2018	9846	2690	12536	-2390
2019	10421	2425	12846	2473

Sumber Data BPS Kepulauan Riau (2019).

Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau terkonsentrasi di daerah perkotaan dan jumlah terus meningkat, sehingga total penduduk miskin mengalami trend meningkat dari tahun 2016 hingga 2019. Berbeda di perdesaan, jumlah penduduk miskin trendnya justru menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kecenderungan tersebut, apakah disebabkan faktor pertumbuhan PDRB, pengangguran, pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, ataupun pelaksanaan pembangunan yang tidak *pro poor*. Berikut digambarkan perkembangan PDRB dan pertumbuhannya serta jumlah pengangguran pada Tabel 2.

Tabel 2 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan Pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015- 2018.

Tahun	PDRB (milyar Rp)	Perubahan (%)	Pengangguran (Jiwa)	Perubahan (%)
2015	155131		55318	
2016	162853	4.97	56896	2.90
2017	166111	2.00	69160	21.6
2018	173689	4.56	69113	-0.1

Sumber : BPS Kepulauan Riau (2019)

Perkembangan PDRB ADHK di Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2015 hingga 2018 mengalami peningkatan atau tumbuh, dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi, dimana pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2017 hanya sebesar 2%. Pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 4.56%. Kondisi ini menunjukkan kemampuan Provinsi Kepulauan Riau dalam

menghasilkan nilai tambah mengalami peningkatan. Harapan daerah ini sebagai kawasan perdagangan dan industri akan meningkatkan pertumbuhan, sehingga dapat mempengaruhi penurunan kemiskinan dan juga pengangguran.

Sejalan dengan perkembangan laju PDRB, pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuasi. Ketika terjadi penurunan laju PDRB pada tahun 2017, terjadi peningkatan pengangguran yang cukup besar hingga mencapai 12.6 %. Selanjutnya pada saat terjadi peningkatan laju PDRB tahun 2018, terjadi penurunan tingkat pengangguran sebesar 0.1%. Pengangguran sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, karena tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan tidak akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan akhirnya menurunkan kemampuannya dalam kesejahteraan serta memasukkan individunya ke dalam kemiskinan.

Realisasi Belanja APBD untuk Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur serta Perlindungan Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Besaran realisasi belanja APBD untuk pengeluaran di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 hingga 2018 mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 mencapai 65.4 persen dan tahun 2017 mencapai 59.91 persen. Peningkatan tersebut menurun cukup tajam pada tahun 2018 hanya sebesar 4.27 persen. Hal ini menggambarkan besarnya upaya pemerintah daerah dalam peningkatan investasi sumberdaya yang dilakukan oleh pemerintah terutama pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur untuk penyediaan fasilitas umum. Peningkatan pengeluaran ini merupakan kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam meningkatkan pembentukan modal manusia. Investasi manusia tersebut positif hubungannya dengan kualitas sumberdaya manusia, dan pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan Belanja APBD di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial tahun 2015 - 2018.

Tabel 3. Realisasi Belanja APBD di bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Perlindungan Sosial Tahun 2015 - 2018.

Tahun	Pengeluaran Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur (milyar Rp)	Perubahan (%)	Pengeluaran Perlindungan Sosial (milyar Rp)	Perubahan (%)
2015	1419691000	-	135569700	-
2016	2348226000	65.40	98150150	-27.60
2017	3755018000	59.91	171317900	74.55
2018	3915385000	4.27	171815400	0.29

Sumber : DJPK (berbagai tahun)

Realisasi belanja APBD untuk perlindungan sosial juga mengalami fluktuasi, terjadi peningkatan pada tahun 2017 dan 2018, sedangkan tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Alokasi pengeluaran ini ditujukan membantu menanggulangi kemiskinan melalui program-program *pro poor* untuk pengentasan kemiskinan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi dan pemberian bantuan langsung tunai. Kebijakan fiskal ini diharapkan bisa meningkatkan permasalahan kesejahteraan penduduk miskin, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinannya.

Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah dilakukan pengolahan regresi menggunakan metode OLS maka diperoleh nilai *Adjusted R*² sebesar 0.68 yang berarti bahwa penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, pengangguran, belanja publik untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, serta belanja publik untuk perlindungan sosial sebesar 68 persen. Pengaruh tersebut signifikan pada taraf $\alpha = 0.05$ dengan nilai F hitung sebesar 26.843 ($p < 0.05$). Hal ini berarti secara simultan PDRB, pengangguran, belanja publik di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta belanja publik untuk perlindungan sosial berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau. Hasil estimasi model persamaan dengan menggunakan Metode OLS ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi Model Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau

Variabel	Koefisien (b)	t	Signifikansi
(Konstanta)	12.903	3.708	0.001*
PDRB	-.362	-2.709	0.010*
PENGANGGURAN	1.015	7.589	0.000*
BELANJA ₁	-.513	-2.374	0.022*
BELANJA ₁	-.804	-1.875	0.067
Adjusted R ²	0.68		
F- hitung	26.843	F- statistik	0.000

*signifikansi 5%

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis secara parsial terhadap masing-masing variable didapatkan hasil bahwa PDRB berpengaruh menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dengan koefisien sebesar -0.362. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar 1% akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.36%. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Rusdarti (2013) yang juga mendapatkan hasil bahwa PDRB berpengaruh menurunkan jumlah penduduk miskin di Propinsi Jawa Tengah. Sementara penelitian Aziz *et.al* (2016) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini disebabkan upaya pemerataan ekonomi sulit dilakukan mengingat luasnya wilayah dan secara geografis sebaran penduduk miskin daerah dan kantong-kantong kemiskinan di pedalaman sulit dijangkau.

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Pengangguran dalam penelitian ini berpengaruh meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau. Koefisien pengangguran sebesar 1.015, yang berarti setiap peningkatan jumlah pengangguran sebesar 1 persen akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 1.015 persen. Sebaliknya jika pengangguran menurun sebesar 1 persen, maka kemiskinan dapat menurun sebesar 1.015 persen. Dari data menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan ke empat dari 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbanyak

di Indonesia. Selama kurun waktu tahun 2015-2018 tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau lebih besar di wilayah perkotaan dibandingkan di perdesaaan, dimana rata-rata tingkat pengangguran di perkotaan sebesar 6.8% dan di perdesaaan sebesar 4.4%. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau juga cenderung lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Kecenderungan ini juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh meningkatkan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau terutama di wilayah perkotaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyudi dan Rejekiningsih (2013) serta Octaviani (2001) yang menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif meningkatkan kemiskinan. Sukirno (2004) menyatakan bahwa dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat sehingga menurunkan tingkat kemakmuran masyarakat.

Pengaruh belanja pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berdasarkan hasil analisis adalah negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai koefisien sebesar 0.513. Setiap terjadi peningkatan belanja pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sebesar 1 persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0.513 persen. Sartiyah (2018) menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai berperan penting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia, meskipun dampaknya kecil. Menurut Becker (1994) pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan adalah merupakan investasi karena pengeluaran tersebut akan menghasilkan *return* pada masa yang akan datang. Pengeluaran dalam pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kesehatan dan pengetahuan seseorang sehingga produktivitas dan pendapatan orang tersebut akan meningkat di masa yang akan datang. Pendidikan dan kesehatan merupakan variable penting dalam pembentukan modal manusia. Sharp (1996) mengidentifikasi salah satu penyebab munculnya kemiskinan adalah karena adanya perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia menyebabkan produktivitasnya rendah yang pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya tingkat

upah yang diterima. Rendahnya kualitas manusia ini salah satunya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyudi dan Rejekiingsih (2013) yang menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah terutama untuk fungsi pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan perlindungan sosial berpengaruh menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian Sartiyah (2018) mendapatkan hasil bahwa bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur berpengaruh meningkatkan produktivitas yang selanjutnya peningkatan produktivitas tenaga kerja akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial berhubungan negatif dengan kemiskinan. Koefisien Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial -0.804 sebesar dengan nilai $p > 0.061$ yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini bisa disebabkan karena pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial seperti program bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, subsidi dan lain lain tidak tepat sasaran. Penentuan target yang tidak tepat menimbulkan kesalahan dalam menentukan siapa yang diikutkan (*inclusion*) dan siapa yang tidak diikutkan (*exclusion*) sehingga menyebabkan pengeluaran pemerintah tidak efektif dalam membantu masyarakat miskin yang membutuhkan. Selain itu data pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial yang digunakan dalam penelitian ini di dalamnya juga termasuk peningkatan manfaat pensiun PNS/TNI/POLRI. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri dan Bandiono (2018) yang menemukan bahwa belanja fungsi perlindungan sosial berpengaruh negatif terhadap indeks kemiskinan di Provinsi Aceh. Selanjutnya Basuki (2007) juga menyatakan bahwa kegagalan program-program penanggulangan kemiskinan dikarenakan program-program tersebut cenderung fokus pada penyaluran bantuan sosial bagi rakyat miskin serta adanya latar belakang dan pemahaman yang kurang tepat tentang kemiskinan itu sendiri membuat program program tersebut tidak tepat sasaran.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi fenomena kemiskinan, tetapi belum mampu mengatasi permasalahan tersebut. Kurang tepatnya penanggulangan yang dilakukan pemerintah menyebabkan fenomena kemiskinan tetap ada (Solikatun, 2014). Efektivitas bantuan sosial dalam percepatan penurunan kemiskinan bisa dilakukan dengan meningkatkan keakuratan penargetan, memperluas cakupan dan memperbaiki integrasi sasaran program (SMERU, 2019).

Penelitian ini telah dilakukan transformasi data ke dalam bentuk logaritma natural dan respesifikasi variabel untuk mendapatkan estimator linear yang tidak bias yang terbaik. Untuk melengkapi ketersediaan data dalam penelitian ini dilakukan peramalan dengan *moving average*. Uji normalitas data dengan *Kosmolgorov-Smirnov test* didapatkan hasil signifikansi lebih besar dari nilai α ($\alpha = 0.05$), yaitu $0.839 > 0.05$. Ini berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal. Pengujian lainnya dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan yang kuat antara variabel bebas (multikolineritas), dengan menganalisis nilai *variance inflation factor* (VIF). Hasil pengujian diperoleh nilai VIF untuk semua variable < 10 (PDRB=2.79; PENGANGGURAN=2.97; BELANJA₁=2.23; BELANJA₂=2.42), ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antara variabel bebas di dalam model. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah rentang waktu data *time series* yang digunakan tidak cukup lama dan beberapa data dilengkapi menggunakan *forecasting* dengan *moving average* seperti data pengeluaran pemerintah sehingga variasi yang dihasilkan masih kurang tinggi sehingga mempengaruhi hasil signifikansi variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa PDRB dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur mempunyai pengaruh menurunkan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini berarti bahwa setiap dilakukan peningkatan PDRB dan

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur akan menurunkan kemiskinan. Selanjutnya pengangguran berpengaruh meningkatkan jumlah penduduk miskin, sedangkan pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial menunjukkan hubungan negatif tetapi tidak berpengaruh menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau. Tidak signifikannya pengaruh pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial terhadap turunnya kemiskinan bisa disebabkan karena tidak tepatnya sasaran program-program perlindungan sosial yang ada selama ini.

REFERENSI

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*. Tanjungpinang (ID)
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. *Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau, Agustus 2018*. Tanjungpinang (ID)
- Becker, Garry. S. 1994. *Human Capital; A Theory and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Fithri, Naylal dan Kaluge, David. 2017. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 15(2).pp : 130-136.
- Gunawan Sumodiningrat, 2002. *Sinkronisasi Program Penanggulangan kemiskinan*, Jakarta, Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM.
- Makmun. 2003. Gambaran Kemiskinan dan *Action Plan* Penanganannya. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*. 7 (2), pp: 1-36.
- Misdawita, A. Arini, P.S. 2013. Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. 4 (2) pp:147-161.
- Octaviani, D. 2001. Inflasi, Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia. Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke. *Media Ekonomi* 7(8) pp : 100-118.
- Putra, Komang A.A., Arka, Sudarsana. 2018. Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnaliekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 7(3) pp: 416-444.
- Kemenkeu (2019). <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Rusdarti, Sebayang. K.L. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Economia* 9 (1) pp: 1-9.
- Sartiyah. Hartoyo, S., Syaukat, Y., Oktaviani, R. 2017. The Effect of Government Spending on Education in Aceh Province Indonesia. *Journal of Economic Development, Environment and People*. 6 (4) pp:18-28.

- Sartiyah. 2018. Dampak Investasi Modal Manusia Terhadap Investasi Modal Manusia Terhadap Kinerja Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Aceh. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. [Disertasi]
- Sharp, A.M., Register C.A., dan Grimps, P.W. 2006. *Economics of Social Issues*. New York: McGrawHill.
- SMERU Research Institute. 2018. Efektifitas Program Bantuan Sosial Dalam Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan. <http://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Dr.-Asep-Suryahadi-Efektifitas-Program-Bantuan-Sosial-Dalam-Pengurangan-Kemiskinan-dan-Ketimpangan.pdf> diunduh 15 November 2019
- Solikatun, Supono, Masruroh, Y. Zuber, A. 2014. Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*. 3(1) pp: 70-90.
- Sukirno, S. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta : Grafindo Persada
- Wahyudi, D. Rejekiingsih, T.W. 2013. Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*. 2 (1) pp: 1-15.
- Yanthi, Cokorda I.D.P. dan Marhaeni, A.A.I.N. 2015. Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. 11 (2) pp : 68 – 75.